



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FLODESA ANGGARIJANTO
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT AUDIT TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
3. NHK : 240758

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.525.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,  
WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 379 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA  
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA  
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
4. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/201 m2 di KAB / KOTA KOTA  
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 37.65 m2/37.65 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 155.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SPM SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI  
Rp. 5.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYLA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA TRAIL CRF 149 CC Tahun 2020, HASIL  
SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, ROYAL ENFIELD METEOR 350 Tahun 2021, HASIL  
SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 227.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.548.024.625
F. HARTA LAINNYA	Rp.	38.864.419
Sub Total	Rp.	10.494.389.044
III. HUTANG	Rp.	680.281.236
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.814.107.808

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.